

## Collaborative Governance dalam Penanganan Permasalahan Kemacetan di Kota Makassar

Venike Sriyanti

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: venikesriyanti@gmail.com

### Abstract

*Traffic congestion is one of the most complex urban problems that requires the involvement of multiple stakeholders in its management. Makassar City, as the center of economic, governmental, and service activities in Eastern Indonesia, faces challenges arising from the increasing number of motor vehicles that are not proportional to the available road infrastructure capacity. This condition has resulted in severe traffic congestion on several major roads throughout the city. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in addressing traffic congestion in Makassar City. The research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study adopted Ansell and Gash's Collaborative Governance framework, which consists of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The findings indicate that the implementation of collaborative governance in addressing traffic congestion in Makassar City has been relatively effective. The initial conditions of collaboration were established through a shared commitment among stakeholders to address congestion issues. Institutional design was supported by clear divisions of roles and responsibilities among agencies. Facilitative leadership played an important role in fostering coordination and communication among stakeholders, while the collaborative process was reflected through cooperation, information sharing, and the implementation of joint programs. The established collaboration has contributed positively to more effective and integrated traffic congestion management in Makassar City.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Traffic Congestion, Urban Transportation, Local Government, Makassar City.*

### Abstrak

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan jasa di kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan berupa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya tingkat kepadatan lalu lintas pada sejumlah ruas jalan utama di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan permasalahan kemacetan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar telah berjalan cukup baik. Kondisi awal kolaborasi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan dalam mengatasi kemacetan. Desain kelembagaan didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antarinstansi. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam membangun koordinasi dan komunikasi antaraktor, sedangkan proses kolaborasi diwujudkan melalui kerja sama, pertukaran informasi, dan pelaksanaan program bersama. Kolaborasi

yang terjalin memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya penanganan kemacetan secara lebih efektif dan terintegrasi di Kota Makassar.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance, Kemacetan Lalu Lintas, Transportasi Perkotaan, Pemerintah Daerah, Kota Makassar.*

---

## **PENDAHULUAN**

Transportasi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di wilayah perkotaan. Keberadaan sistem transportasi yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, permasalahan transportasi dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu permasalahan transportasi yang banyak dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan tidak hanya mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya transportasi, tetapi juga berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat, meningkatnya konsumsi bahan bakar, serta memburuknya kualitas lingkungan akibat tingginya emisi kendaraan bermotor.

Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di kawasan Indonesia Timur menghadapi permasalahan kemacetan yang semakin kompleks. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar menjadi tujuan mobilitas masyarakat dari berbagai daerah di sekitarnya untuk melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, maupun pemerintahan. Tingginya mobilitas tersebut menyebabkan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan yang terjadi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas di berbagai ruas jalan utama Kota Makassar.

Permasalahan kemacetan tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan, tetapi juga dipengaruhi oleh

berbagai faktor lain, seperti keterbatasan kapasitas jalan, rendahnya penggunaan transportasi publik, tingginya aktivitas ekonomi di kawasan tertentu, serta perilaku pengguna jalan yang belum sepenuhnya tertib. Kompleksitas permasalahan tersebut menjadikan kemacetan sebagai isu publik yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga atau organisasi pemerintah. Penanganan kemacetan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda namun saling berkaitan.

Perkembangan paradigma tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan publik yang kompleks membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor. Pendekatan ini dikenal dengan konsep *collaborative governance*, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan kolaboratif dianggap lebih mampu menjawab berbagai persoalan publik yang bersifat multidimensional karena memungkinkan terjadinya sinergi sumber daya, pertukaran informasi, serta pembagian tanggung jawab antar pemangku kepentingan.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan pengaturan tata kelola yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bertujuan untuk merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar, berbagai aktor memiliki peran strategis sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas, sementara Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur jalan. Di sisi lain, Kepolisian memiliki fungsi pengaturan dan penegakan hukum lalu lintas, sedangkan sektor swasta dan masyarakat turut berkontribusi dalam mendukung kelancaran sistem transportasi perkotaan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemacetan memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif.

Meskipun berbagai program dan kebijakan telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan, permasalahan tersebut masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Makassar hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses collaborative governance dijalankan dalam penanganan kemacetan serta bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan dibangun dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan permasalahan kemacetan di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh

gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan permasalahan kemacetan di Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dengan fokus pada instansi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kemacetan lalu lintas.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan penanganan kemacetan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mengacu pada teori Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash yang meliputi starting conditions (kondisi awal), institutional design (desain kelembagaan), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif), dan collaborative process (proses kolaborasi) dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Starting Conditions (Kondisi Awal)**

Kemacetan lalu lintas di Kota Makassar merupakan permasalahan publik yang muncul akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa di kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar mengalami mobilitas masyarakat yang sangat tinggi setiap harinya. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai ruas jalan utama mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk.

Permasalahan kemacetan yang semakin kompleks mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya penanganannya. Kesadaran bahwa kemacetan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja menjadi dasar terbentuknya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, instansi teknis, serta pihak terkait lainnya. Kesamaan tujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menjadi landasan awal dalam membangun kerja sama antar aktor. Dengan demikian, kondisi awal yang melatarbelakangi kolaborasi adalah adanya kebutuhan bersama untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

#### **Institutional Design (Desain Kelembagaan)**

Pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar didukung oleh adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan. Dinas Perhubungan berperan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan fasilitas transportasi, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan. Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, sementara Kepolisian berperan dalam pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum.

Desain kelembagaan yang dibangun menunjukkan adanya mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program penanganan kemacetan. Setiap aktor menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing namun tetap berada dalam satu tujuan yang sama. Kejelasan peran tersebut menjadi faktor penting dalam menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, keberadaan regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pengelolaan transportasi menjadi dasar

hukum dalam pelaksanaan kolaborasi antar lembaga.

#### **Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)**

Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan yang mampu memfasilitasi hubungan antar pemangku kepentingan. Dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai aktor untuk bersama-sama merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, forum komunikasi, serta berbagai kegiatan yang bertujuan menyatukan persepsi dan langkah kerja antarinstansi.

Kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mendorong partisipasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap sistem transportasi perkotaan. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah berupaya menciptakan kesepahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan program penanganan kemacetan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan proses kolaborasi dan memastikan setiap aktor dapat menjalankan perannya secara optimal.

#### **Collaborative Process (Proses Kolaborasi)**

Proses kolaborasi dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar berlangsung melalui berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Proses tersebut diawali dengan identifikasi permasalahan, penyusunan agenda bersama, serta pelaksanaan berbagai program yang bertujuan mengurangi tingkat kemacetan. Komunikasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan terjadinya pertukaran

informasi, penyesuaian program kerja, serta penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Kolaborasi yang dibangun juga mencerminkan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas sistem transportasi perkotaan. Berbagai upaya seperti pengaturan lalu lintas, peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan transportasi publik, serta penegakan disiplin berlalu lintas dilakukan melalui kerja sama antar lembaga. Proses kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kemacetan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang saling mendukung sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar telah menunjukkan adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan transportasi perkotaan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, kolaborasi yang dibangun melalui kondisi awal yang sama, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang berkelanjutan menjadi modal penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan permasalahan kemacetan di Kota Makassar telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing. Ditinjau dari aspek starting conditions, kolaborasi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan para aktor dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang semakin kompleks di Kota Makassar. Kesadaran akan pentingnya kerja sama menjadi dasar terbentuknya kolaborasi dalam penanganan masalah transportasi perkotaan.

Pada aspek institutional design, kolaborasi didukung oleh adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarinstansi, sehingga setiap aktor dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selanjutnya, pada aspek facilitative leadership, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mampu membangun koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan. Sementara itu, pada aspek collaborative process, proses kolaborasi diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, pertukaran informasi, serta pelaksanaan berbagai program bersama dalam upaya mengurangi tingkat kemacetan.

Penerapan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Makassar telah berjalan cukup baik dan menunjukkan adanya sinergi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam mendukung penyelesaian permasalahan kemacetan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Ratnasari, D., Nurmandi, A., & Purnomo, E. P. (2022). *Implementation of e-government*

in improving public service performance. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 13(2), 145–160.

Wibawa, A., Syamsuddin, M., & Rahman, A. (2023). E-government and public participation in local governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(1), 45–58.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.